

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan isi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950 dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950. Visi Jawa Tengah adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Informasi mengenai Provinsi Jawa Tengah dapat diakses di jatengprov.go.id lengkap dengan web link kabupaten dan kotanya.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak kedua di Indonesia. Jumlahnya adalah 35 kabupaten dan kota, dengan rincian dua puluh sembilan kabupaten yang merupakan jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia dan enam kota . Jumlah tersebut mengungguli Provinsi Sumatera Utara di peringkat ketiga dengan jumlah 33 kabupaten dan kota , sedangkan jumlah kabupaten dan kota di Indonesia yang paling banyak adalah di Provinsi Jawa Timur dengan total 38 kabupaten dan kota (www.otda.kemendagri.go.id).

Tabel 1.1

Nama Provinsi dengan Jumlah Kabupaten dan Kota Terbanyak

No	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten dan Kota
1	Jawa Timur	38
2	Jawa Tengah	35
3	Sumatra Utara	33
4	Papua	29
5	Sulawesi Selatan	24
6	Nanggroe Aceh Darussalam	23

Sumber : www.otda.kemendagri.go.id

Sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak kedua, Jawa Tengah masih memiliki tingkat pengungkapan informasi yang belum lengkap pada situs resminya dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara, seperti pengungkapan informasi tentang Opini Audit di Jawa Tengah yang belum dilaksanakan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah dimana wewenang atas pengelolaan masing-masing daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya masing – masing. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu, masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah selama ini. Maka informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat harus jelas

dan transparan. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan proses pertanggungjawaban pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan terhadap pemerintah daerah. Pengungkapan informasi tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah melalui media elektronik yaitu situs resmi (*e-government*) dan sejenisnya . Pengungkapan informasi melalui situs resmi (*e-government*) dirasa cukup efektif dan efisien bagi pengguna informasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan investor. Karena kemudahan dalam mengakses dan kepraktisan dalam penggunaannya. Bagi pemerintah, pengungkapan informasi dapat membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Salah satu tujuan pengembangan *e-government* adalah untuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh Indonesia (Inpres No 3 tahun 2003). Masyarakat dan investor dapat mengakses informasi tentang daerah agar memahami potensi daerah yang dimiliki sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera .

Di Indonesia, pengungkapan informasi pada website resmi Pemda masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di setiap website Pemda. Motivasi untuk secara sukarela melaporkan informasi pemerintahan pada website bergantung kepada urgensi masing-masing pemda. Perintah untuk pengungkapan informasi pemerintahan pada situs resmi diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah secara berkala melalui dokumen tertulis dan situs resmi pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan publikasi kepada pengguna informasi yang bertujuan untuk keterbukaan informasi dari pengguna informasi, seperti masyarakat, investor, maupun pemerintah itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 7 UU No. 14/2008 megamatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Hampir semua Pemda di Indonesia memiliki website, dengan kualitas website dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada website milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah : informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

Beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi perintah untuk membuat menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dalam situs resmi pemerintah daerah, namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki menu konten tersebut sehingga pengguna informasi mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengembangan situs resmi pemerintah daerah bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah daerah dengan mudah, dan ikut serta untuk berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia secara online. Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan situs resmi dengan isi yang selalu baru, ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan pengguna informasi, serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu paramaternya adalah minimum konten atau isi dan layanan

publik. Hal tersebut mengakibatkan informasi minimum dan layanan publik yang seharusnya disajikan tetapi tidak tersedia dalam situs resmi pemerintah daerah (situs resmi pemerintah daerah).

Dalam kaitannya dalam pengungkapan informasi baik informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti opini audit. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Opini audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit ditentukan dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan BPK seperti kesesuaian dengan SAP dan kecukupan pengungkapan.

Opini audit juga didasarkan kepada pengungkapan informasi yang dilakukan Pemda dalam LKPDnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Rahim dan Martani (2012) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh pada pengungkapan informasi, baik keuangan maupun non keuangan. Hilmi (2010) juga membuktikan bahwa tingkat penyimpangan keuangan pada temuan audit berpengaruh positif. Menurut berita yang diakses di *metrotvnews.com*, Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK menilai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sejak 2012, tetapi hasil opini audit tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui langsung perolehan

opini terhadap pemerintah daerah tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum diungkapkan Pemda melalui media elektronik yang dimiliki.

Ukuran Pemerintah Daerah (Pemda) digambarkan dengan seberapa besar aset yang dimiliki oleh Pemda. Besarnya aset yang dimiliki Pemda akan menggambarkan seberapa besar ukuran Pemda tersebut. Hal ini berimplikasi pada keuntungan pengungkapan dengan menggunakan media internet yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran Pemda. Selain itu Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2010) mengatakan bahwa Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten , presentasi pengungkapan , dan total pengungkapan .

Pengembangan suatu sistem dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pada instansi yang bersangkutan, khususnya kemampuan keuangan. Pengembangan *e-Government* pada Pemda masih terbilang hal yang baru dan aplikasinya pada masing-masing daerah bervariasi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Daerah yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dapat mengeluarkan belanja bagian teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi melalui website lebih baik. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi publik yang disampaikan pada website resmi Pemda.

Martani et al. (2013) menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website resmi Pemda. Garcia-Sanchez et al. (2013) melakukan penelitian yang sama terkait hubungannya dengan pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda di Spanyol, namun tidak ditemukan hasil yang signifikan. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah harus mengikuti anggaran yang telah disusun sebelumnya, maka dari itu pengembangan suatu inovasi dalam Pemda bergantung pada dana yang tersedia setelah dikurangi dengan belanja wajib yang telah dianggarkan sebelumnya. Kemampuan keuangan pemda akan mempengaruhi pengembangan inovasi yang dilakukan. Pemda yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat

mengembangkan sistem informasi yang lebih bagus sehingga informasi yang diungkapkan pada website lebih banyak .

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situsnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Rahim dan Martani (2012). Saran dari penelitian tersebut adalah penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan informasi pada website pemda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu pengembangan indeks skoring yang digunakan dengan menambah jumlah indeks yang lebih menunjukkan jumlah informasi yang disampaikan pada website pemda. Penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya namun belum ditemukan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Situs resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan bentuk transparansi pemerintahan. Informasi yang tersedia dalam situs resmi tersebut juga beragam, mulai dari profil umum daerah, kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, peraturan daerah, hingga informasi keuangan. Perkembangan pengungkapan informasi pada situs resmi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dilihat dari transparansi informasi yang diberikan. Namun, informasi yang telah disajikan ternyata belum optimal karena informasi penting seperti informasi opini audit yang tidak dapat diketahui publik langsung di situs pemerintahan daerah tersebut dan informasi keuangan yang tidak *up to date*.

Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah pusat dan daerah masih bersifat sukarela (*vouuntary*) sehingga menimbulkan asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintahan telah diteliti oleh peneliti terdahulu tetapi masih menemukan keterbatasan informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana opini audit, ukuran pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, dan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?
2. Bagaimana pengaruh opini audit , ukuran pemerintah daerah , kemampuan keuangan daerah secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari :
 - A. Pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?
 - B. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?
 - C. Pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemda kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situsnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana opini audit, ukuran pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah dan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari :
 - A. Opini audit terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.

- B. Ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.
- C. Kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah serta sebagai bahan kajian dalam penelitian di masa yang akan datang tentang *good governance*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai media untuk belajar serta referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah mulai reaktif terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi timbal balik untuk perkembangan daerahnya serta memotivasi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan situs

resminya dalam rangka penyampaian informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan masyarakat.

2. Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pelaporan keuangan dan non keuangan yang dapat diakses pada situs resmi pemerintahan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian yang digunakan adalah pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016 . Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah .

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah enam bulan. Periode penelitian ini menggunakan pengungkapan informasi yang terdapat pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang diamati dalam waktu tiga bulan, yaitu bulan Oktober-Desember.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran tentang tempat penelitian yang digunakan. Kemudian latar belakang penelitian yang berisi tentang fenomena atau gejala dari peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang membahas teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian, difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pemikiran yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya masih harus diuji secara empiris serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasannya harus diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Sistematika

pembahasan ini akan lebih tampak jelas luas cakupan, batasan, dan benang merahnya apabila disajikan dalam sub judul tersendiri. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

(HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN)